



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MALANG  
TAHUN 2023**

# KATA PENGANTAR

Menyajikan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang sampai dengan tahun 2023. Dalam laporan ini disajikan mulai dari perencanaan strategik seperti yang tertera dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2023 sampai pada realisasi dan evaluasi atas kinerja sampai dengan tahun 2023 sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, kegiatan ataupun akitifitas penanggulangan bencana di tahun – tahun mendatang.

Kami sadar bahwa LKjIP BPBD Kota Malang ini tidak terlepas dari adanya kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk penyempurnaan di periode mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan asistensi sehingga penyusunan LKjIP BPBD Kota Malang sampai dengan tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Demikian laporan akuntabilitas ini disajikan, semoga bermanfaat khususnya bagi BPBD Kota Malang dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Malang, Januari 2024

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH



Dis PRAYITNO, M.AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19671210 198809 1 002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Umum

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis yang dimaksud adalah penerapan paradigma tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Akuntabilitas, Predikibilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Apabila keseimbangan peran dari keempat alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan instansi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sampai dengan tahun 2023 sebagai perwujudan

Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kota Malang memberikan tugas kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Perwal Nomor 49 Tahun 2021 untuk melaksanakan Tugas diantaranya sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/institusi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

## **B. Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut gambaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

- BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan bencana.
- BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD, yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- Kepala Pelaksana BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud terdiri dari:

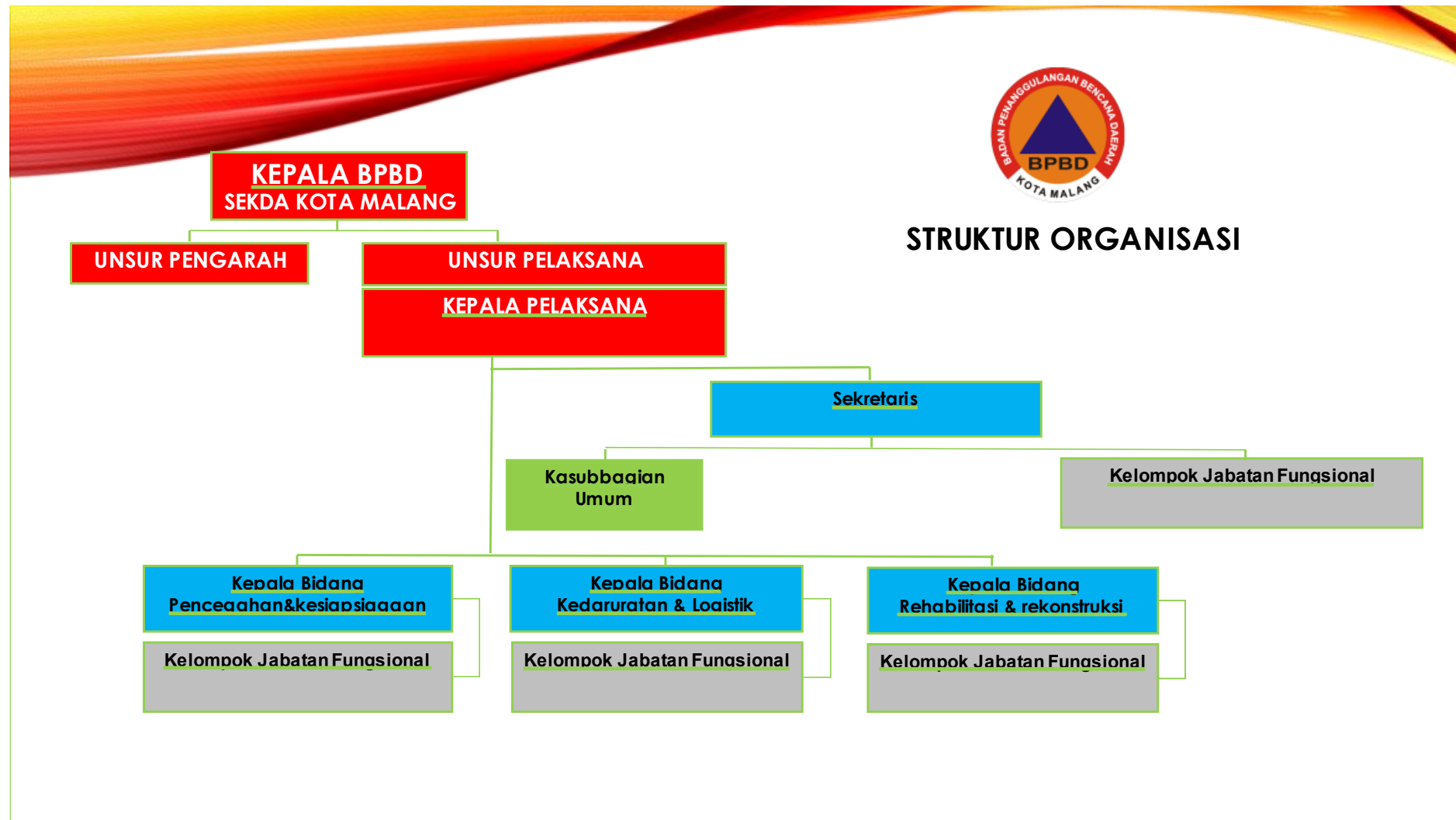
- a. Ketua;
- b. Anggota.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas :

1. Subbagian Umum; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPBD Kota Malang



Sumber : Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2021

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023 yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2023 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut Indikator Kinerja Sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Disamping itu, Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang untuk Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

#### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kota Malang untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2018-2023:

- Tujuan : Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana
- Sasaran 1 : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana



Sasaran 2 : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 2.1**  
**Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra**  
**Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Data Awal (2018)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana		Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana	0%	20%	40%	-	-	-
		Disaster Resilience Scorecard	-	-	-	72	97	122
	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	13 kel	5 kel	-	-	-	-
		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	-	100%	100%	-	-	-
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	53,33%	30%	30%	-	-	-
	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase masyarakat sadar bencana	-	-	0,67%	50%	55%	60%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	78	78	79	79	80
		Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	85,81	83	83	82	83	84

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	✓	✓	✓	✓	✓
		Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓
		a) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana b) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana c) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) d) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	✓	✓	✓	✓	✓

		Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a) Peningkatan sarpras kebencanaan; b) Peningkatan kualitas dan kuantitas TRC; c) Peningkatan kompetensi SDM aparatur; d) Peningkatan kerjasama lintas sektor	Mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat secara optimal	✓	✓	✓	✓	✓

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam SK nomor: 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023.

Adapun IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5		
1.	Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana	20%	40%	-	-	-
		Disaster Resilience Scorecard	-	-	72	97	122
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	5 kel	-	-	-	-
		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	100%	100%	-	-	-
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	30%	30%	-	-	-
3.	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	-	0,67%	50%	55%	60%
4.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	78	79	79	80

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

**Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :**

**Tujuan : Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana  
Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	60%	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3.405.614.401,-
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.8.152.707.097,-
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	84		

#### D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip dalam penyusunan LKjIP. Pertama, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat kegagalan maupun keberhasilan. Kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. Ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

### **A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi :

1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut adalah:

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja tahun anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	60%	64%	106,67%	-
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80	82,35	102,94%	-
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	84	79,83	95,03%	adanya peningkatan kejadian dan korban terdampak banjir yang sebagian besar belum / tidak mendapatkan penanganan yang efektif

### 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 dilakukan dengan merujuk kepada target capaian kinerja yang terdapat dalam Perubahan Renstra BPBD Kota Malang. Perubahan Renstra tersebut dilakukan pada tahun 2021 dimana terdapat perubahan mendasar pada sasaran strategis yaitu dari "Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat

dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana", dengan tiga indikator yaitu Persentase kelurahan tangguh, Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai *respond time*, Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; kemudian sasaran strategis tersebut diganti menjadi "Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana" dengan indikator "Persentase Masyarakat Sadar Bencana". Seiring dengan perubahan nomenklatur sasaran strategis maka formulasi untuk perhitungan ketercapaian sasaran strategis juga berubah. Perubahan formulasi ini khususnya untuk menghitung jumlah seluruh masyarakat yang menjadi target dalam pelayanan penanggulangan bencana dimana pada awalnya jumlah masyarakat ini dihitung secara keseluruhan se-kota Malang, selanjutnya dalam perubahan formulasi ini jumlah masyarakat yang menjadi target dalam pelayanan penanggulangan bencana adalah hanya masyarakat yang bermukim di Kawasan Rawan Bencana saja. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2018-2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal (2018)	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	13 kel	16 kel	-	-	-	-	320%	-	-	-	-
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	-	34,2%	73,63%	-	-	-	34,2%	73,63%	-	-	-
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	53,33 %	29%	17,65%	-	-	-	96,67%	58,83%	-	-	-



Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase masyarakat sadar bencana	-	-	0,23%	50,73%	56,43%	64%	-	34,33%	101,46%	102,6%	106,67%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	76,20	77,11	79,15	80,50	82,35	97,69%	98,86%	100,19%	101,90%	102,94%
	Nilai SKM Pelayanan Penanggungjawab Bencana	85,81	78,47	79,38	81,68	76,31	79,83	94,54%	95,64%	99,61%	91,94%	95,03%

Pengukuran kinerja dari tahun 2018-2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel diatas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana (*sasaran strategis ini dipergunakan hanya sampai tahun 2020 karena pada tahun 2021 dilakukan review Renstra dan sasaran ini beserta indikatornya disesuaikan nomenklaturnya*)

1) Indikator 1 : Persentase kelurahan tangguh bencana. (*Untuk indikator ini capaiannya hanya sampai tahun 2019 karena pada tahun 2020 diganti menjadi Persentase Masyarakat Sadar Bencana*). Pada tahun 2019 capaian untuk indikator ini adalah sebesar 320% karena targetnya hanya 5 kelurahan namun karena adanya tambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2019 maka jumlah kelurahan yang dibina untuk menjadi Kelurahan Tangguh Bencana menjadi 16 kelurahan.

2) Indikator 2 : Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai *respond time*.

Pada indikator ini dengan ketiadaan data awal pada tahun 2018 karena merupakan indikator yang baru dibuat, tingkat capaiannya mengalami peningkatan dari 34,2% di tahun 2019 menjadi 73,63% pada tahun 2020. Meningkatnya capaian pada indikator ini dikarenakan pada tahun 2020 ada bencana covid-19 yang mana penanganannya dilakukan secara gotong royong oleh seluruh stakeholder. Selanjutnya indikator ini mulai tahun 2021 tidak lagi dipergunakan.

3) Indikator 3 : Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Indikator ini pada data awal tahun 2018 telah mencatat angka 53,33% karena pada tahun tersebut penanganan masalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bersifat fisik masih dipusatkan di BPBD. Selanjutnya dengan melihat data pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dan bahkan di tahun – tahun selanjutnya indikator ini ditiadakan dikarenakan adanya pembatasan dalam nomenklatur kegiatan / sub kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPBD dimana pekerjaan – pekerjaan yang bersifat fisik konstruksi pascabencana dialihkan kepada perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019.

b) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana  
*(Sasaran strategis ini mulai digunakan pada tahun 2020 untuk menggantikan sasaran*

*strategis Persentase Kelurahan Tangguh Bencana).*

- 1) Indikator 1 : Persentase masyarakat sadar bencana.  
Pada indikator ini untuk tahun 2020 hanya tercapai sebesar 0,23% dari target 0,67%. Kecilnya target dan realisasi dari indikator ini pada tahun 2020 dikarenakan variabel penyebut yang menjadi pembanding capaian kinerja didasarkan pada jumlah seluruh masyarakat Kota Malang sehingga capaian kinerja menjadi sangat tidak berarti. Hal ini pula yang mendasari perubahan formulasi untuk indikator ini pada tahun 2021 saat review Renstra dimana variabel penyebut yang menjadi pembanding capaian kinerja diganti menjadi Masyarakat yang Bermukim di Wilayah Rawan Bencana yang mana pada tahun 2021 berdasarkan analisis spasial diketahui bahwa jumlah warga yang bermukim adalah sebesar 46.360 jiwa. Selanjutnya dapat terlihat dengan jelas bahwa terdapat kenaikan secara gradual capaian kinerja dari indikator ini yang selalu melebihi target dikarenakan wilayah – wilayah rawan bencana sudah terpetakan dan masyarakat yang menjadi target sasaran layanan kebencanaan sudah dapat ditentukan sehingga layanan-layanan kebencanaan sudah terfokus dan tersegmentasi sesuai kebutuhannya.

- c) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 1) Indikator 1 : Nilai SAKIP.  
SAKIP mulai digunakan menjadi indikator sejak tahun 2019 dan tingkat capaiannya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun karena pada tingkat kota SAKIP selalu menjadi penekanan untuk ditingkatkan capaiannya di perangkat daerah melalui berbagai upaya sistematis dan terstruktur oleh pimpinan daerah. Hal ini dipicu oleh adanya penilaian SAKIP yang rutin dilakukan oleh kemenPAN. Dengan adanya langkah-langkah sistematis yang dilakukan secara terstruktur tersebut maka akuntabilitas meningkat seiring dengan berbagai perbaikan internal yang telah dilakukan oleh BPBD.

2) Indikator 2 : Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana.

Indikator ini masuk dalam sasaran strategis karena segala ikhtiar dan upaya Penanggulangan Bencana berfokus kepada masyarakat dimana hasil akhir dari layanan kebencanaan haruslah menjadikan masyarakat menjadi konsumen dari aktifitas perangkat daerah dalam melaksanakan manajemen bencana. Untuk itu sangat penting untuk mengukur seberapa tinggi/rendah kepuasan masyarakat dalam layanan kebencanaan yang telah diberikan sehingga dapat menjadi bahan review dan instropeksi bagi perangkat daerah terkait.

Dari hasil pengukuran selama 5 (lima) tahun terakhir sampai tahun 2023 dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas layanan kebencanaan walau telah masuk kategori “Baik” namun masih cenderung stagnan karena ada beberapa faktor yakni: Layanan yang diberikan oleh BPBD masih belum komprehensif, makin meluasnya wilayah-wilayah yang rawan bencana khususnya banjir, serta belum adanya

penanganan yang optimal dari pemerintah untuk menangani persoalan bencana banjir dan longsor yang umum terjadi di Kota Malang.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi termasuk didalamnya realisasi kinerja Tujuan untuk mengukur kinerja outcome ultimate selama 5 (lima) tahun.

Pengukuran realisasi kinerja dengan mengacu tabulasi target jangka menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Tabel. 3.3**  
**Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1.	Tujuan: Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana	-	0	0	-	-	-
		Disaster Resilience Scorecard	122	-	-	54	98	101
2.	Sasaran 1: Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	-	16 Kel	-	-	-	-
		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	-	34,2%	73,63%	-	-	-
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	-	29%	17,65%	-	-	-
3.	Sasaran 1: Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	60%	-	0,23%	50,73%	56,43%	64%
4.	Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80	76,20	77,11	79,15	80,50	82,35
		Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	84	78,47	79,38	81,68	76,31	79,83

#### 4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Standar Nasional lainnya

Perhitungan realisasi kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) / standar nasional lainnya memerlukan nilai standar nasional, namun sasaran strategis yang diampu oleh BPBD Kota Malang tidak memiliki standar nasional ataupun standar SPM. Akan tetapi Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewajiban daerah dalam urusan Trantibumlinmas sub urusan bencana masuk menjadi target indikator dalam 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang yakni kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dan kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Ketiga kegiatan tersebut menunjang Program Penanggulangan Bencana yang diampu oleh BPBD Kota Malang sebagaimana tertera dalam Renstra dan Renja.

**Tabel. 3.4**  
**Realisasi kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	2	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	64%	-	-
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	82,35	-	-
		Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	79,83	-	-

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana yang diamanahkan dalam PP No. 2 Tahun 2018 dan Pemendagri No.59 Tahun 2021, bahwa ditetapkan target SPM adalah sebesar 100%. Adapun pencapaian SPM sub urusan bencana di Kota Malang untuk tahun 2023 sebagaimana telah diinput dan tertera dalam aplikasi e-spm dari Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada situs [https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian\\_pemda/form/3573/4/2023](https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/3573/4/2023) adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.5.**  
**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub. Urusan Bencana**  
**Tahun 2023**

No	Indikator SPM	Target	Realisasi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	89,63%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut di atas terdapat satu dari total tiga indikator SPM yang nilai realisasinya di bawah target. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran untuk mencapai keseluruhan target penduduk yang akan dilayani yang ditetapkan di awal periode. Hal ini karena jumlah penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana sebanyak 46.360 orang yang mana jumlah tersebut dibagi capaiannya dalam satu periode perencanaan jangka menengah yaitu selama 5 tahun sehingga setiap tahun ditetapkan jumlah masyarakat yang perlu dilayani adalah sejumlah 9.272 orang.

#### 5. **Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan.**

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sampai dengan tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana

Indikator: Disaster Resilience Scorecard

Capaian indikator tujuan ini pada tahun 2023 (yang diukur pada awal tahun 2024) adalah sebesar 101 dari target 122. Dari detail hasil pengukuran (terlampir) diketahui bahwa tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh belum optimalnya pencapaian persyaratan Kota Tangguh oleh beberapa stakeholder kebencanaan yakni antara lain dalam hal ketentuan building code gedung / bangunan yang belum diterapkan

secara menyeluruh (ketangguhan infrastruktur), kurangnya dana yang memadai untuk pelaksanaan mitigasi / pengurangan risiko bencana dan minimnya asuransi publik untuk mengcover dampak bencana, belum optimalnya sarana prasarana untuk menangani dampak bencana, dan belum terwujudnya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.

a. Indikator : Persentase Masyarakat Sadar Bencana telah berhasil melebihi target, dengan realisasi 64% dari target 60%. Penyebab keberhasilan ini ditunjang sebagian besar oleh masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 14.207 orang. Tingginya tingkat capaian dalam layanan informasi rawan bencana ini terutama keberhasilan dalam layanan melalui media online pada website dan youtube, media sosial seperti Instagram, Twitter (X), Facebook, Tiktok, Whatsapp, dll.

2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

a. Indikator 1 : Nilai SAKIP telah berhasil mencapai target dengan realisasi 82,35 dari target 80. Hal ini ditunjang oleh kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang semakin baik.

b. Indikator 2 : Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana sudah masuk kategori baik namun belum mencapai target dengan realisasi 79,83 dari target 84. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kejadian banjir yang menimbulkan luasnya masyarakat yang terdampak banjir tersebut yang merupakan lokasi yang rutin terkena banjir namun belum ada solusi yang efektif dari pemerintah untuk menuntaskan permasalahan banjir yang berlarut-larut tersebut.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis efisiensi adalah analisis dengan membandingkan realisasi atas capaian kinerja dengan realisasi atas anggaran untuk indikator berkenaan sehingga dapat diketahui apakah anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indicator dimaksud sudah efisien atau belum. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,81% rata-rata anggaran yang dimanfaatkan adalah sebesar



89,42% sehingga menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 3.6**  
**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)**  
**Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	60	64	106,67	3.405.614.401,-	3.384.133.273,-	99,37	107,35
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80	82,35	102,94	8.152.707.097,-	6.834.191.035,-	83,83	122,79
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	84	79,83	95,04			83,83	113,37
Rata – Rata Capaian Kinerja				101,55	Rata – Rata Capaian Anggaran		91,6	110,86

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada indikator Persentase Masyarakat Sadar Bencana terdapat efisiensi penggunaan dana dimana dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,37% lebih kecil dari capaian kinerja sebesar 106,67%.
- 2) Pada indikator nilai SAKIP terdapat efisiensi penggunaan dana dimana dengan capaian realisasi anggaran sebesar 83,83% adalah lebih kecil dari capaian kinerja sebesar 102,94%.
- 3) Pada indikator Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana terdapat efisiensi penggunaan dana dimana dengan capaian anggaran 83,83% adalah lebih kecil dari capaian kinerja sebesar 95,04%, namun efisiensi penggunaan dana pada indikator ini belum menuai hasil yang diharapkan karena target belum tercapai 100%.

**7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

**Tabel. 3.7**  
**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**  
**Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	106,67	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	85	84,92	100,09	-
				Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 60 menit	50 Menit	120	-
				Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	84,5	84,5	meningkatkan pagu anggaran APBD untuk menambah bantuan logistik, serta mengupayakan peningkatan bantuan baik dari Provinsi maupun Pusat
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	102,94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	80	82,35	102,94	-
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	95,04						

**1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut:**

**Sasaran 1 :** Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.

**Indikator 1 :**

Persentase Masyarakat Sadar Bencana telah berhasil mencapai target, dengan realisasi 64% dari target 60% atau tercapai sebesar 106,67%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penanggulangan Bencana yang memiliki 3 (tiga) indikator:

- a. Indeks Risiko Bencana: telah berhasil mencapai target yaitu 84,92 dari target 85. Indeks Risiko Bencana ini menggambarkan tinggi / rendahnya suatu daerah memiliki risiko untuk terkena bencana dimana semakin rendah

angka risiko maka menunjukkan semakin rendah pula potensi terjadinya bencana di wilayah tersebut. Adapun angka capaian indeks risiko bencana tersebut diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan survey yang mereka lakukan bekerjasama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur (nilai hasil perhitungan untuk tahun 2023 disajikan terlampir).

- b. Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana: 50 menit. Indikator ini mengambil rata-rata waktu dari hadirnya petugas penanggulangan bencana sejak kejadian bencana tersebut dilaporkan. Dari target indikator kurang dari 60 menit diketahui bahwa kesiapan petugas respon cepat bencana telah cukup memadai dimana petugas telah hadir sesuai target yang ditentukan.
- c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik: dari target capaian 100% ternyata masih belum mencapai target yaitu masih tercapai 84,5%, hal ini disebabkan korban bencana yang belum mendapat bantuan logistik sebagian besar adalah korban bencana banjir yang rutin terjadi setiap tahun karena belum ada penanganan yang efektif dan menyeluruh. Mereka belum mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan logistik karena dampak yang ditimbulkan dari kejadian banjir tersebut umumnya kecil dan tidak secara signifikan mengganggu kehidupan dan penghidupan korban terdampak dimaksud.

**asasan 2** : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

**Indikator 1** : Nilai SAKIP

Indikator ini terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai SAKIP dimana target senilai 80 tercapai senilai 82,35. Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini ditunjang oleh kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan akuntabilitas kinerja yang semakin baik sesuai hasil Berita Acara dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023 dari Inspektorat Kota Malang.

### **Indikator 2 : Nilai SKM**

Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana telah memperoleh predikat nilai yang masuk kategori baik dengan realisasi sebesar 79,83 walaupun realisasi ini masih belum memenuhi target sebesar 84. Hal ini umumnya disebabkan oleh adanya ketidakpuasan masyarakat korban terdampak banjir yang sebagian besar merasa bahwa pemerintah belum bisa melaksanakan solusi yang efektif dan menyeluruh untuk penanganan banjir yang sering terjadi di permukiman mereka.

## **2) Upaya Perbaikan Pada Perencanaan Berikutnya**

Adapun upaya perbaikan yang akan dilaksanakan dalam periode perencanaan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan yang terpadu dan komprehensif terhadap kejadian banjir di berbagai kawasan permukiman di Kota Malang;
2. Memproduksi kajian dan analisis yang bersifat struktural maupun non struktural berdasarkan keilmuan yang relevan untuk memberikan masukan terhadap penanganan kejadian bencana di Kota Malang kepada berbagai stakeholder terkait;
3. Memaksimalkan penyampaian informasi terkait program kerja BPBD Kota Malang kepada masyarakat secara formal maupun informal;
4. Melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan pencapaian target;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia baik secara internal maupun terhadap stakeholder penanggulangan bencana;

## **B. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 adalah sebesar 88,41% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.8**  
**Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Tahun 2023**

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>3.405.614.401,00</b>	<b>3.384.133.273,00</b>	<b>99,37%</b>
A	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</b>	<b>240.004.700,00</b>	<b>239.152.665,00</b>	<b>99,64%</b>
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	240.004.700,00	239.152.665,00	99,64%
B	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>2.148.626.001,00</b>	<b>2.133.832.351,00</b>	<b>99,31%</b>
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	789.480.000,00	785.098.995,00	99,45%
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	297.146.000,00	296.165.500,00	99,67%
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.002.000.001,00	998.622.856,00	99,66%
5	Penyusunan Rencana Kontijensi	60.000.000,00	53.945.000,00	89,91%
C	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>764.614.700,00</b>	<b>759.418.257,00</b>	<b>99,32%</b>
6	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	529.333.000,00	526.260.000,00	99,42%
7	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	235.281.700,00	233.158.257,00	99,10%
D	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>252.369.000,00</b>	<b>251.730.000,00</b>	<b>99,75%</b>
8	Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	252.369.000,00	251.730.000,00	99,75%
II	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.152.707.097,00</b>	<b>6.834.191.035,00</b>	<b>83,83%</b>
E	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>427.128.000,00</b>	<b>403.418.851,00</b>	<b>94,45%</b>
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270.364.000,00	262.546.487,00	97,11%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.020.000,00	48.255.964,00	84,63%
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.744.000,00	92.616.400,00	92,85%
F	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.414.298.202,00</b>	<b>3.338.985.884,00</b>	<b>75,64%</b>
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.375.328.202,00	3.300.296.068,00	75,43%

13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38.970.000,00	38.689.816,00	99,28%
<b>G</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>168.327.000,00</b>	<b>90,99%</b>
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000,00	44.935.000,00	<b>99,86%</b>
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.000.000,00	123.392.000,00	<b>88,14%</b>
<b>H</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>867.200.800,00</b>	<b>770.445.776,00</b>	<b>88,84%</b>
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.851.028,00	98,51%
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.643.900,00	195.089.500,00	93,95%
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	413.729.900,00	338.303.582,00	81,77%
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	3.020.000,00	50,33%
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.827.000,00	224.181.666,00	97,54%
<b>I</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>446.461.280,00</b>	<b>392.536.617,00</b>	<b>87,92%</b>
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.936.800,00	128.289.267,00	74,61%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.524.480,00	264.247.350,00	96,26%
<b>J</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.225.978.000,00</b>	<b>1.220.066.932,00</b>	<b>99,52%</b>
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.608.000,00	212.608.000,00	100,00%
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	613.370.000,00	609.945.000,00	99,44%
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000,00	397.513.932,00	99,38%
<b>K</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>586.640.815,00</b>	<b>540.409.975,00</b>	<b>92,12%</b>
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	434.148.700,00	425.212.900,00	97,94%
27	Pemeliharaan Mebel	12.980.000,00	9.990.000,00	76,96%
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.512.115,00	56.245.250,00	62,14%
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.000.000,00	48.961.825,00	99,92%
<b>TOTAL</b>		<b>11.558.321.498</b>	<b>10.218.324.308</b>	<b>88,41%</b>

# BAB IV

## PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja Tujuan dan Sasaran yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja BPBD sampai dengan tahun 2023. Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut sebanyak 2 (dua) indikator telah berhasil mencapai target dan terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target. Adapun indikator kinerja yang telah mencapai target tersebut adalah:

1. Persentase masyarakat sadar bencana;
2. Nilai SAKIP;

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target adalah:

1. Disaster Resilience Scorecard; dan
2. IKM Pelayanan Penanggulangan Bencana.

Ketidaktercapaian target indikator untuk Disaster Resilience Scorecard disebabkan oleh belum optimalnya pencapaian persyaratan Kota Tangguh oleh beberapa stakeholder kebencanaan yakni antara lain dalam hal ketentuan building code gedung / bangunan (standar ketahanan bangunan terhadap gempa) yang belum diterapkan secara menyeluruh (ketangguhan infrastruktur); kurangnya dana yang memadai untuk pelaksanaan mitigasi / pengurangan risiko bencana dan minimnya asuransi publik untuk mengcover dampak bencana; belum optimalnya sarana prasarana untuk menangani dampak bencana, dan belum terwujudnya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sedangkan ketidaktercapaian target indikator untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan bencana disebabkan adanya ketidakpuasan masyarakat korban terdampak banjir yang sebagian besar merasa bahwa pemerintah belum bisa melaksanakan solusi yang efektif untuk penanganan banjir yang sering terjadi di permukiman mereka.

Adapun upaya perbaikan yang akan dilaksanakan dalam periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan yang terpadu dan komprehensif terhadap kejadian banjir di berbagai kawasan permukiman di Kota Malang;

2. Memproduksi kajian dan analisis yang bersifat struktural maupun non struktural berdasarkan keilmuan yang relevan untuk memberikan masukan terhadap penanganan kejadian bencana di Kota Malang kepada berbagai stakeholder terkait;
3. Memaksimalkan penyampaian informasi terkait program kerja BPBD Kota Malang kepada masyarakat secara formal maupun informal;
4. Melakukan evaluasi internal untuk peningkatan pencapaian target kinerja;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sampai dengan tahun anggaran 2023 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.





# BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

## BNPB

Nomor : B-20.15/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penyampaian Hasil IKD 2023 dan IRBI 2023

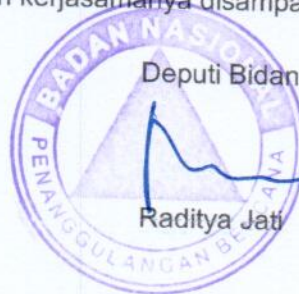
15 Januari 2024

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Timur  
di tempat

BNPB telah menerima nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2023 di tingkat kabupaten/kota melalui media <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>. Nilai IKD yang dikumpulkan telah dilakukan verifikasi bertahap, dimulai oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh BNPB. Berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur yang telah konsisten mendorong kabupaten/kota untuk melakukan penilaian IKD setiap tahun;
2. BNPB juga memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten/Kota yang telah melakukan penilaian IKD pada 2023, sebagaimana terlampir;
3. BNPB telah menyampaikan surat dengan nomor B-403.15/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2023 dan telah memberikan kesempatan Kabupaten/Kota untuk memperpanjang waktu pengumpulan dan pemenuhan bukti verifikasi IKD 2023 hingga 21 Desember 2023;
4. Setelah perpanjangan waktu, maka didapatkan jumlah Kabupaten/Kota yang mengumpulkan IKD di Provinsi Jawa Timur sejumlah 36 dari 38 Kabupaten/kota;
5. Setelah melalui beberapa proses tersebut, maka nilai IKD 2023 rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah 0,57 dan nilai IRB 2023 untuk Provinsi Jawa Timur adalah 118,61.
6. BNPB menghimbau Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengkoordinasikan pengumpulan IKD Kabupaten/Kota di tahun 2024;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Raditya Jati

Tembusan :

1. Kepala BNPB;
2. Sekretaris Utama;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran

Nomor Surat : B-20.15/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2023

Tanggal : 15 Januari 2023

**Nilai IKD 2023 dan IRB 2023 Kabupaten/Kota  
di Provinsi Jawa Timur**

KABUPATEN/KOTA	IKD 2023	IRB 2023
Pacitan	0,68	128.57
Ponorogo	0,51	108.61
Trenggalek	0,63	116.44
Tulungagung	0,66	125.29
Blitar	0,59	149.35
Kediri	0,62	110.61
Malang	0,61	132.49
Lumajang	0,76	131.03
Jember	0,55	148.78
Banyuwangi	0,70	125.32
Bondowoso	0,59	113.69
Situbondo	0,67	110.33
Probolinggo	0,56	160.55
Pasuruan	0,71	133.08
Sidoarjo	Tidak Menilai	97.64
Mojokerto	0,71	106.07
Jombang	0,40	132.17
Nganjuk	0,59	98.38
Madiun	0,35	128.75
Magetan	0,64	107.52
Ngawi	0,46	118.76
Bojonegoro	0,58	88.75
Tuban	0,50	131.91
Lamongan	0,58	126.76
Gresik	0,60	110.54
Bangkalan	0,53	117.70
Sampang	0,58	110.43
Pamekasan	0,69	120.46
Sumenep	0,57	137.43
Kota Kediri	0,76	80.74
Kota Blitar	0,40	109.04
Kota Malang	0,57	84.92
Kota Probolinggo	0,39	107.22
Kota Pasuruan	0,48	108.37

KABUPATEN/KOTA	IKD 2023	IRB 2023
Kota Pasuruan	0,48	108.37
Kota Mojokerto	Tidak Menilai	135.88
Kota Madiun	0,44	127.72
Kota Surabaya	0,54	129.88
Kota Batu	0,62	95.85

\*) Tautan untuk mengunduh file excel IKD Kabupaten/Kota Final 2023 : [https://bit.ly/IKD\\_Jawa\\_Timur\\_2023\\_Final](https://bit.ly/IKD_Jawa_Timur_2023_Final)





PEMERINTAH KOTA MALANG  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jl. Gajahmada No. 2A Telp / Fax. (0341) 364450 Kode Pos.65119  
**MALANG**

**BERITA ACARA**

**HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari Senin tanggal 19 Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan klarifikasi terhadap hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang**. Adapun hasil Evaluasi SAKIP diperoleh Total Nilai sebesar **82,35** dengan rincian nilai tiap komponen sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai 24,6 dari bobot 30
2. Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai 24 dari bobot 30
3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,25 dari bobot 15
4. Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 22,5 dari bobot 25

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP tersebut di atas maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen SAKIP maupun implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Memperbaiki tampilan *website* resmi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sehingga masyarakat dengan mudah mengakses dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Laporan kinerja ;
2. Meningkatkan kualitas informasi laporan kinerja melalui perbaikan pencapaian target kinerja, beserta upaya nyata dan/atau hambatan;
3. Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai terhadap kualitas laporan kinerja melalui perubahan budaya kinerja organisasi (kedisiplinan atau peningkatan pelayanan)

Evaluator :

1. BAGUS GALIH H.,S.T. .....  
NIP.19810828 201101 1 003
2. SANTI DWI J.K.,S.E.,M.M. .....  
NIP.19860786 201503 2 002

Perangkat Daerah :

1. RAHMAT HARTAWAN,SE,MPSc,M.Eng. .....  
NIP.19750426 200501 1 004
2. ....

**FORM EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP  
TAHUN 2023**

**PERANGKAT DAERAH : BPBD KOTA MALANG**

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PELAKSANAAN		DOKUMEN PENDUKUNG	
			SUDAH	BELUM	ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Memperbaiki tampilan website resmi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sehingga masyarakat dengan mudah mengakses dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Laporan kinerja	Tampilan website BPBD Kota Malang secara umum sudah diperbaiki dan secara khusus untuk akuntabilitas sudah lebih mudah di akses oleh masyarakat	√		√	
2.	Meningkatkan kualitas informasi laporan kinerja melalui perbaikan pencapaian target kinerja, beserta upaya nyata dan/atau hambatan	Perbaikan berfokus pada pencapaian kinerja masing - masing individu melalui Indikator Kinerja Individu (IKI)	√		√	
3.	Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai terhadap kualitas laporan kinerja melalui perubahan budaya kinerja organisasi (kedisiplinan atau inovasi)	Perubahan budaya kinerja organisasi sudah mulai dilaksanakan melalui sebuah inovasi baru yaitu Aplikasi DISASTER (Disaster Information System Aiming For Smart integrated Respond) serta dilakukan pemantauan dan pengembangan aplikasi secara reguler	√		√	

Malang, Juli 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah



**Drs. PRAYITNO, M.A.P.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671210 198809 1 002



# Badan Penanggulangan Bencana Daerah

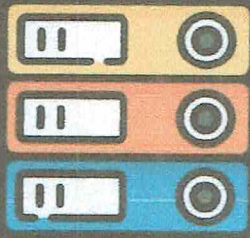
- Lapor Bencana
- Berita Terbaru
- Akuntabilitas kinerja
- Peta Bencana
- Data Bencana
- Lapor Via WA
- Sambat Online

Kunjungi Website

# PUBLIKASI

PUBLIKASI

## Renstra



Renstra 2015-2019

Renstra 2020-2024

Renstra 2025-2029

## Renja



Renja 2016



Renja 2017



Renja 2018



Renja 2019



Renja 2020



Renja 2021





# Prinsip Kerja Aplikasi DISASTER

(Disaster Information System Aiming for Smart  
inTEgrated Respond)

Aplikasi Disaster adalah sebuah sistem informasi manajemen bencana yang terintegrasi dan berbasis mobile web

Tiga komponen utama dalam Aplikasi Disaster yaitu Pelapor, Responden, dan Admin (BPBD)



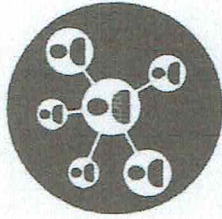
Masyarakat melaporkan peristiwa kebencanaan di wilayahnya



Operator menerima laporan dan mengarahkan responden terdekat dengan lokasi kejadian



Responden terpilih melakukan assesment dan analisis kebutuhan pascabencana



Operator melakukan koordinasi dan pemenuhan sumber daya yang tepat



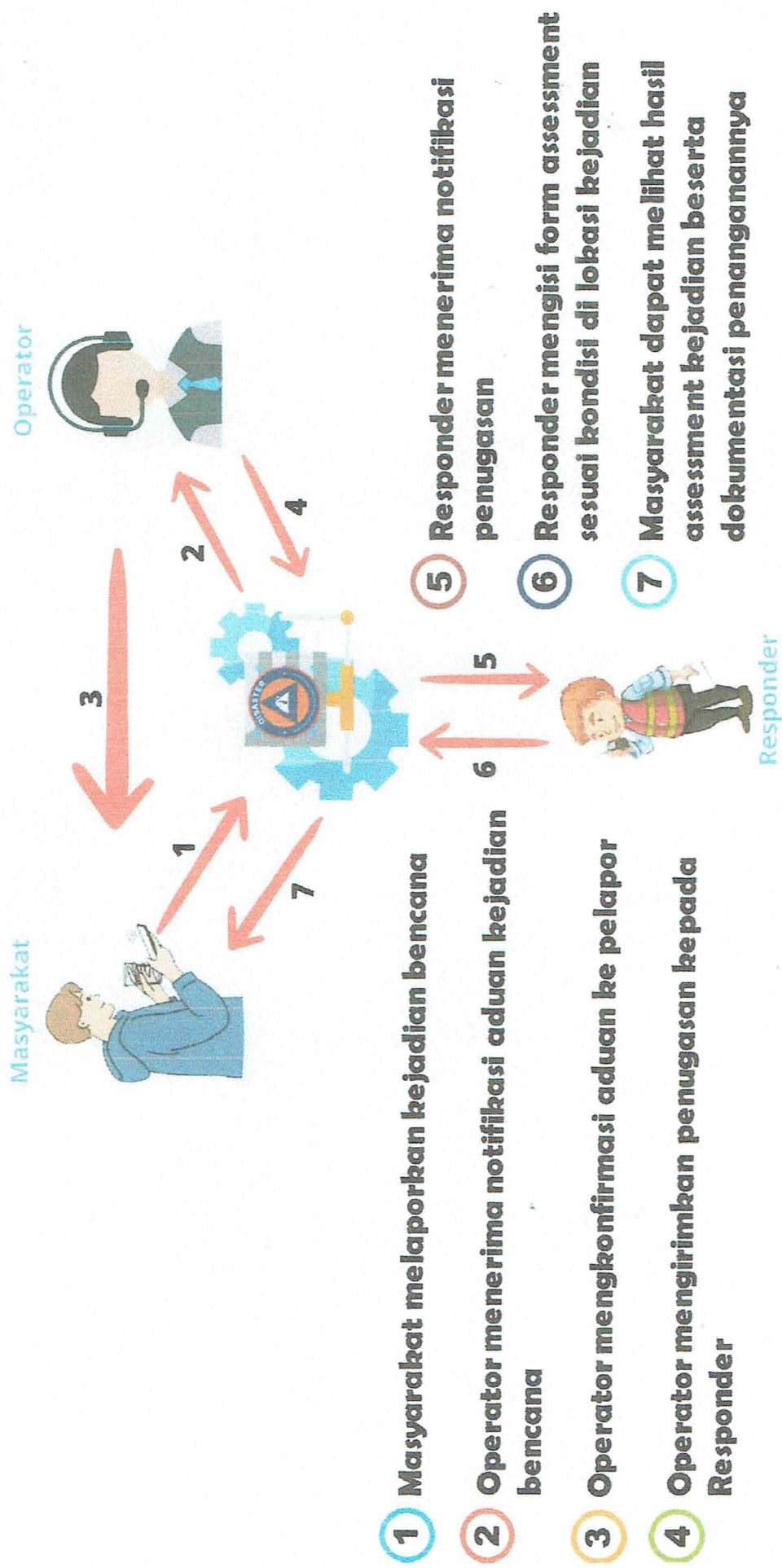
Proses penanganan bencana terpantau melalui mobile web



Semua data pelaporan dan penanganan terecord di dalam aplikasi disaster



# Alur Aplikasi Disaster





# LAYANAN DISASTER

## Sistem Peringatan Dini

- Prakiraan cuaca harian
- Peringatan dini curah hujan
- Peringatan dini banjir



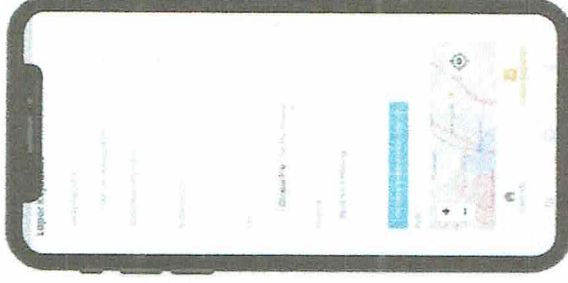
## Statistik Kejadian

Data statistik kejadian yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabulasi dan peta



## Assesment Kejadian

Masyarakat dapat berperan langsung dalam pendataan kejadian bencana di sekitarnya melalui aplikasi

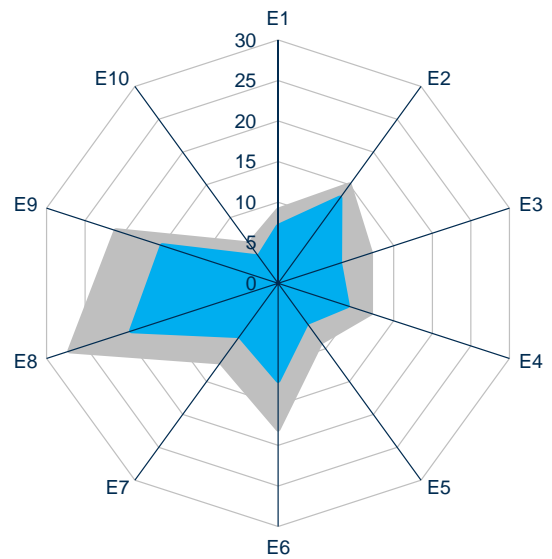




**Malang City**  
 Indonesia  
 31 January 2024

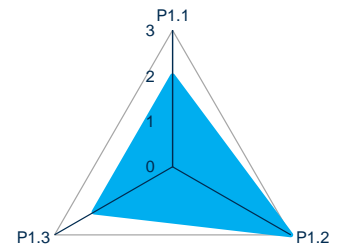
The overall score for this assessment is 101 / 141

Please send the completed tool and PDF report to: [isdr-campaign@un.org](mailto:isdr-campaign@un.org)  
 Disaster Resilience Scorecard for Cities - Preliminary Level Assessment Tool, v.1.0.  
 © UNDRR, 2017.



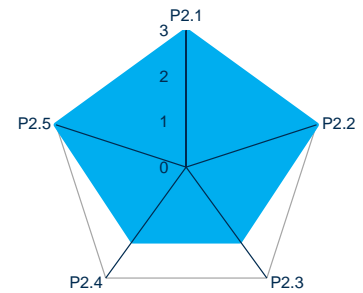
**Essential 01: Organize for Resilience**

P1.1	Does the City master plan (or relevant strategy/plan) adopt the Sendai Framework?	2
P1.2	Is there a multi-agency/sectoral mechanism with appropriate authority and resources to address disaster risk reduction?	3
P1.3	Is resilience properly integrated with other key city functions / portfolios?	2



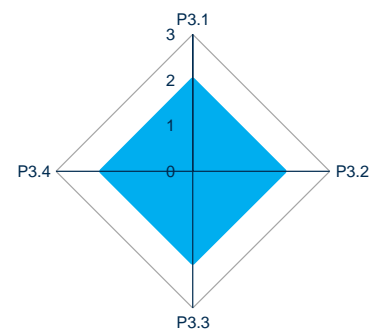
**Essential 02: Identify, Understand and Use Current and Future Risk Scenarios**

P2.1	Does the city have knowledge of the key hazards that the city faces, and their likelihood of occurrence?	3
P2.2	Is there a shared understanding of risks between the city and various utility providers and other regional and national agencies that have a role in managing infrastructure such as power, water, roads and trains, of the points of stress on the system and city scale risks?	3
P2.3	Are their agreed scenarios setting out city-wide exposure and vulnerability from each hazard, or groups of hazards (see above)?	2
P2.4	Is there a collective understanding of potentially cascading failures between different city and infrastructure systems, under different scenarios?	2
P2.5	Do clear hazard maps and data on risk exist? Are these regularly updated?	3



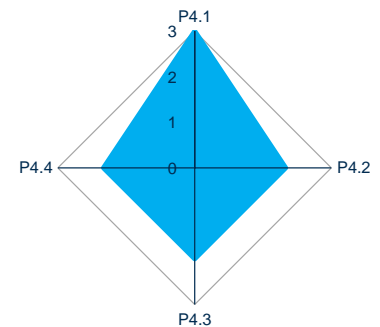
**Essential 03: Strengthen Financial Capacity for Resilience**

P3.1	The city / lead agencies understand all sources of funding, and the "resilience dividends", are well connected, understand all available routes to attract external funding and are actively pursuing funds for major resilience investments.	2
P3.2	Does the city have in place a specific 'ring fenced' (protected) budget, the necessary resources and contingency fund arrangements for local disaster risk reduction (mitigation, prevention, response and recovery)?	2
P3.3	What level of insurance cover exists in the city, across all sectors – business and community?	2
P3.4	What incentives exist for different sectors and segments of business and society to support resilience building?	2



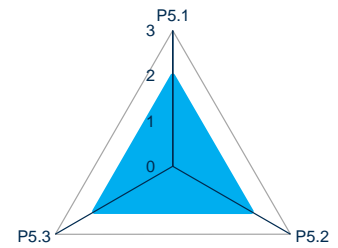
**Essential 04: Pursue Resilient Urban Development**

P4.1	Is the city appropriately zoned considering, for example, the impact from key risk scenarios on economic activity, agricultural production, and population centres?	3
P4.2	Are approaches promoted through the design and development of new urban development to promote resilience?	2
P4.3	Do building codes or standards exist, and do they address specific known hazards and risks for the city? Are these standards regularly updated?	2
P4.4	Are zoning rules, building codes and standards widely applied, properly enforced and verified?	2



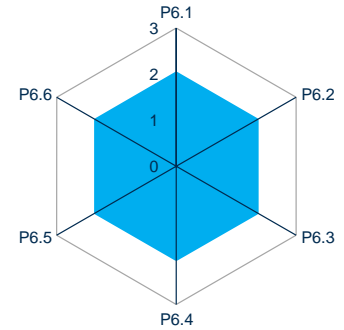
**Essential 05: Safeguard Natural Buffers to Enhance the Protective Functions Offered by Natural Ecosystems**

P5.1	Beyond just an awareness of the natural assets, does the city understand the functions (or services) that this natural capital provides for the city?	2
P5.2	Is green and blue infrastructure being promoted on major urban development and infrastructure projects through policy?	2
P5.3	Is the city aware of ecosystem services being provided to the city from natural capital beyond its administrative borders? Are agreements in place with neighbouring administrations to support the protection and management of these assets?	2



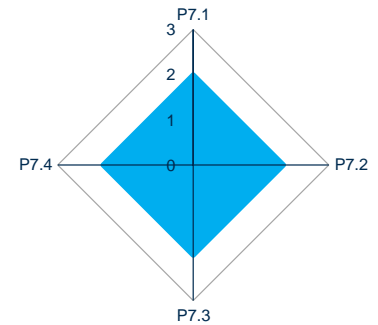
**Essential 06: Strengthen Institutional Capacity for Resilience**

P6.1	Does the city have clear access to all the skills and experience it believes it would need to respond to reduce risks and respond to identified disaster scenarios?	2
P6.2	Does a co-ordinated public relations and education campaign exist, with structured messaging and channels to ensure hazard, risk and disaster information (that can be understood and used) are properly disseminated to the public?	2
P6.3	Extent to which data on the city's resilience context is shared with other organizations involved with the city's resilience.	2
P6.4	Are there training courses covering risk and resilience issues offered to all sectors of the city including government, business, NGOs and community?	2
P6.5	Are training materials available in the majority of languages in common use in the city?	2
P6.6	Is the city proactively seeking to exchange knowledge and learn from other cities facing similar challenges?	2



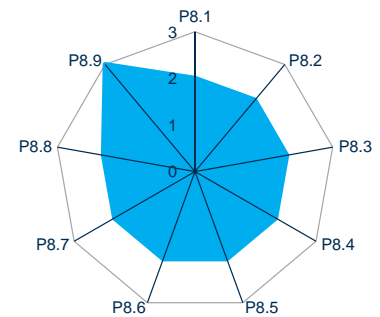
**Essential 07: Understand and Strengthen Societal Capacity for Resilience**

P7.1	Are "grassroots" or community organizations participating in risk reduction and post-event response for each neighbourhood in the city?	2
P7.2	Are there regular training programmes provided to the most vulnerable populations in the city?	2
P7.3	What proportion of businesses have a documented business continuity plan that has been reviewed within the last 18 months?	2
P7.4	How effective is the city at citizen engagement and communications in relation to DRR?	2



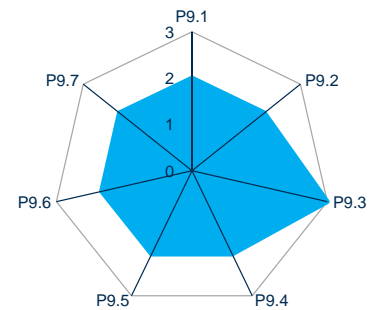
**Essential 08: Increase Infrastructure Resilience**

P8.1	Is critical infrastructure resilience a city priority, does the city own and implement a critical infrastructure plan or strategy?	2
P8.2	Is existing protective infrastructure well-designed and well-built based on risk information?	2
P8.3	Would a significant loss of service for these two essential services be expected for a significant proportion of the city under the agreed disaster scenarios?	2
P8.4	Would a significant loss of service be expected for a significant proportion of the city in the 'worst case' scenario event? In the event of failure would energy infrastructure corridors remain safe (i.e. free from risk of leaks, electrocution hazards etc.)?	2
P8.5	Would a significant loss of service be expected for a significant proportion of the city in the 'worst case' scenario event? In the event of failure would transport infrastructure corridors remain safe (i.e. free from risk of flood, shocks etc) and passable?	2
P8.6	Would a significant loss of service be expected for a significant proportion of the city in the 'worst case' scenario event?	2
P8.7	Would there be sufficient acute healthcare capabilities to deal with expected major injuries in 'worst case' scenario?	2
P8.8	% of education structures at risk of damage from "most probable" and "most severe" scenarios	2
P8.9	Will there be sufficient first responder equipment, with military or civilian back up as required?	3



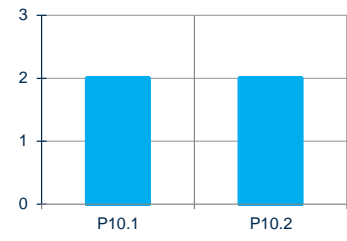
**Essential 09: Ensure Effective Disaster Response**

P9.1	Does the city have a plan or standard operating procedure to act on early warnings and forecasts? What proportion of the population is reachable by early warning system?	2
P9.2	Is there a disaster management / preparedness / emergency response plan outlining city mitigation, preparedness and response to local emergencies?	2
P9.3	Does the responsible disaster management authority have sufficient staffing capacity to support first responder duties in surge event scenario?	3
P9.4	Are equipment and supply needs, as well as the availability of equipment, clearly defined?	2
P9.5	Would the city be able to continue to feed and shelter its population post-event?	2
P9.6	Is there an emergency operations centre, with participation from all agencies, automating standard operating procedures specifically designed to deal with "most probable" and "most severe" scenarios?	2
P9.7	Do practices and drills involve both the public and professionals?	2



**Essential 10: Expedite Recovery and Build Back Better**

P10.1	Is there a strategy or process in place for post-event recovery and reconstruction, including economic reboot, societal aspects etc.?	2
P10.2	Do post-event assessment processes incorporate failure analyses and the ability to capture lessons learned that then feed into design and delivery of rebuilding projects?	2



## Acknowledgements

- IBM and AECOM, who are members of UNDRR's Private Sector Advisory Group (PSAG) co-created the City Disaster Resilience Scorecard that was released in 2014, and collaborated again to produce version 2 of the Scorecard released in April 2015, post Sendai.
- A number of cities have supported official piloting of the Scorecard; feedback from these cities has informed this version. Our thanks go to the resilience champions in the following cities: Greater Manchester and Stoke on Trent, UK; Amadora and Lisbon, Portugal; Jonkoping and Arvika, Sweden; Bugaba, Panama; Kisumu, Kenya; Aqaba, Jordan; Yogyakarta, Indonesia; Makati, Philippines and Islamabad, Pakistan. Numerous other cities have completed Scorecard assessments and developed plan of action. This feedback has also been considered as part of this Scorecard update.
- The Center for Climate and Energy Solutions (C2ES), with IBM and AECOM, has executed a series of workshops in with US cities (Anchorage, AK; Providence, RI; Miami Beach, FL; Kansas City, MO; Phoenix, AZ). Learning from these workshops has informed the update of the Scorecard.
- UNDRR brought together a large working group to develop indicators that have formed substantial part of the Scorecard. Thanks to the entire working group comprising: Arghya Sinha Roy, ADB; Katy Vines, C40 Cities; Sarah Hendel-Blackford, Ecofys; Ben Smith, AECOM; Mark Harvey, Resurgence; Esteban Leon, UN Habitat; Stefan Kohler, UNOPS; Hugh Macleman, OECD; Cassidy Johnston, UCL; Mostafa Mohaghegh, IFRC; Ebru Gencer, CUDRR; Jair Torres and Margherita Fanchiotti, UNESCO; Margaret Arnold, World Bank; and Christopher G. Burton, Global Earthquake Model.

## Questions?

Contact our staff and partners in the region nearest you:

<https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/about>





# PERJANJIAN KINERJA 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG



## PEMERINTAH KOTA MALANG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. PRAYITNO, M.AP.

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang  
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

WALIKOTA MALANG,



Drs. H. SUTIAJI

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,

Drs. PRAYITNO, M.AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19671210 198809 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	60%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.896.398.401,-	APBD Kota Malang
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.220.173.097,-	APBD Kota Malang
	<b>Rp. 10.116.571.498,-</b>	

Malang, 02 Januari 2023

**WALIKOTA MALANG,**  
  
**Drs. H. SUTIAJI**

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,**

  
**Drs. PRAYITNO, M.AP.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19671210 198809 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. HERU PRIJANTONO, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang  
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. PRAYITNO, M.A.P  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang  
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,

Drs. PRAYITNO, M.A.P.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196712101988091002

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN KESIAPSIAGAAN,

Drs. HERU PRIJANTONO, MM.  
Pembina  
NIP. 196503011994121002

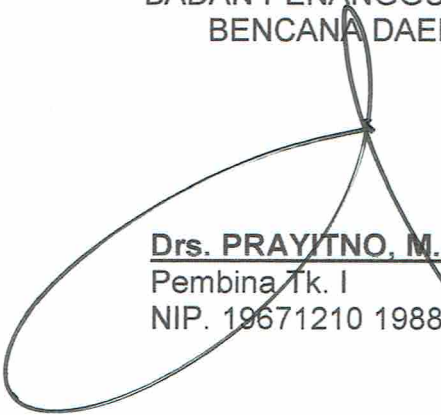
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana Kota Malang	85%

Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 219.004.700,-
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 1.660.410.001,-
Jumlah	Rp. 1.879.414.701,-

Malang, Januari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,

  
**Drs. PRAYITNO, M.A.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671210 198809 1 002

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN KESIAPSIAGAAN,

  
**Drs. HERU PRIJANTONO, MM.**  
Pembina  
NIP. 19650301 199412 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. KHABIBAH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. PRAYITNO, M.AP

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang  
selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,

  
Drs. PRAYITNO, M.AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671210 198809 1 002

KEPALA BIDANG  
KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

  
Dra. KHABIBAH, MM  
Pembina  
NIP. 19670817 199903 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya operasi penanggulangan bencana yang cepat dan terkoordinasi	Rata – rata waktu tanggap ( <i>respond time</i> ) bencana	<1 jam
2.	Terlaksananya penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%
3.	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%
4.	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang
5.	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 764.614.700,-
2. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 529.333.000,-
3. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 235.281.700,-

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,

**Drs. PRAYITNO, M.AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671210 198809 1 002

KEPALA BIDANG  
KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

**Dra. KHABIBAH, MM**  
Pembina  
NIP. 19670817 199903 2 004



## PEMERINTAH KOTA MALANG

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. SRI MARIYANI, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. PRAYITNO. M.AP

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,

  
**Drs. PRAYITNO. M.AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671210 198809 1 002

KEPALA BIDANG  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

  
**Dra. SRI MARIYANI, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19661221 198903 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelayanan pasca bencana	Persentase masyarakat korban bencana yang mendapatkan pelayanan pasca bencana	100%

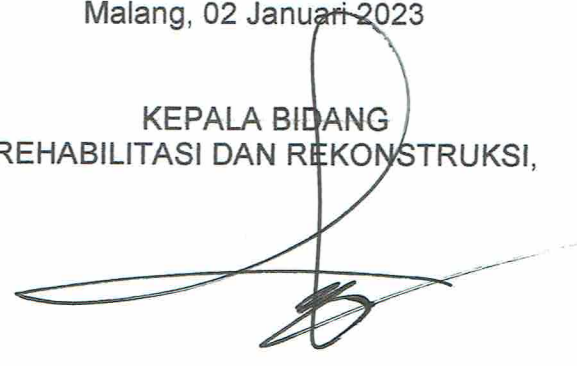
Kegiatan	Anggaran
1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 252.369.000,-

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,

  
**Drs. PRAYITNO. M.AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671210 198809 1 002

KEPALA BIDANG  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

  
**Dra. SRI MARIYANI, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19661221 198903 2 010



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RETNO INDRIYAH, S.E

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. PRAYITNO. M.AP

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,

Drs. PRAYITNO. M.AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671210 198809 1 002

SEKRETARIS,

RETNO INDRIYAH, S.E  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
SEKRETARIAT  
SEKRETARIS

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%
		Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	80%
		Nilai Survey Kepuasan Internal	80


Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 353.480.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.414.298.202,-
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 185.000.000,-
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 514.998.900,-
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 829.818.000,-
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 424.524.480,-
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 498.053.515,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 7.220.173.097,-</b>

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,

SEKRETARIS,

  
**Drs. PRAYITNO, M.AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671210 198809 1 002

  
**RETNO INDRIYAH, S.E**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG SRIYURIANTO, SE.

Jabatan : Analis Kebencanaan Muda Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang (sebagai Sub-koordinator Sub-substansi Pencegahan Bencana)

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. HERU PRIJANTONO, MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN KESIAPSIAGAAN,**

**Drs. HERU PRIJANTONO, MM.**  
Pembina  
NIP. 19650301 199412 1 002

**ANALIS KEBENCANAAN MUDA  
(Sebagai Sub-koordinator Sub-  
substansi Pencegahan Bencana)**

**AGUNG SRIYURIANTO, SE.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650210 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
ANALIS KEBENCANAAN MUDA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%
2.	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Masyarakat di kawasan Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%
3.	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	700 orang
4.	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat yang memperoleh informasi / sosialisasi rawan bencana	1.865 Orang
5.	Terlaksananya analisis permasalahan terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan	Jumlah dokumen hasil analisis permasalahan terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan	1 dokumen
6.	Terlaksananya kajian kebutuhan perencanaan analisis bidang kebencanaan	Jumlah dokumen kajian kebutuhan perencanaan analisis bidang kebencanaan	1 dokumen
7.	Terlaksananya analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas	Jumlah dokumen hasil analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas	1 dokumen
8.	Tersedianya instrument pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan	Jumlah dokumen instrument pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan	1 dokumen
9.	Terlaksananya analisis terhadap bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan	Jumlah dokumen hasil analisis terhadap bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan	1 dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Rp. 219.004.700,- |
| 2. | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  | Rp. 807.120.000,- |
| 3. | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota    | Rp. 285.290.000,- |

4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 508.000.001,-
5. Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp. 60.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.879.414.701,-

Malang, Januari 2022

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN KESIAPSIAGAAN,

Drs. HERU PRIJANTONO, MM.

Pembina

NIP. 19650301 199412 1 002

ANALIS KEBENCANAAN MUDA  
(Sebagai Sub-koordinator Sub-  
substansi Pencegahan Bencana),

AGUNG SRIYURIANTO, SE.

Penata Tingkat I

NIP. 19650210 200604 1 016



## PEMERINTAH KOTA MALANG

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTRISNO, SKM, SH, M.Hum.  
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Muda Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang (sebagai sub-koordinator sub-substansi Rehabilitasi Pascabencana)  
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dra. SRI MARIYANI, M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang  
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

**Dra. SRI MARIYANI, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19661221 198903 2 010

PENATA PENANGGULANGAN  
BENCANA MUDA  
(sebagai Sub-koordinator Sub-  
substansi Rehabilitasi Pasca Bencana),

**SUTRISNO, SKM, SH, M.Hum.**  
Pembina  
NIP. 19650927 199203 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
 PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	75%
2.	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen
3.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Naskah Akademis Rancangan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Bencana	2 dokumen
4.	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana	Jumlah dokumen kebijakan teknis penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana	12 dokumen
5.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi rehabilitasi pasca bencana	12 Kali
6.	Terlaksananya identifikasi kebutuhan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah bencana	Jumlah dokumen identifikasi kebutuhan perbaikan lingkungan, prasarana dan prasarana umum daerah bencana	12 dokumen
7.	Terlaksananya penyusunan rencana intervensi pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah dokumen rencana intervensi pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam	12 dokumen



Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 102.369.000,-
Jumlah	Rp. 102.369.000,-

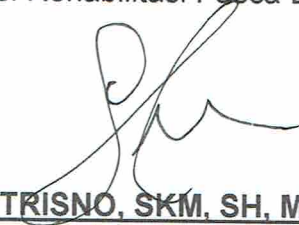
Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,



**Dra. SRI MARIYANI, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19661221 198903 2 010

PENATA PENANGGULANGAN  
BENCANA MUDA  
(sebagai Sub-koordinator Sub-  
substansi Rehabilitasi Pasca Bencana),



**SUTRISNO, SKM, SH, M.Hum.**  
Pembina  
NIP. 19650927 199203 1 010



## PEMERINTAH KOTA MALANG

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZERRY RISKY YUARDHINO, ST.

Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Muda Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang (sebagai Sub-koordinator Sub-substansi Rekonstruksi Pascabencana)

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dra. SRI MARIYANI, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

**Dra. SRI MARIYANI, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19661221 198903 2 010

PENATA PENANGGULANGAN  
BENCANA MUDA  
(sebagai Sub-koordinator Sub-substansi  
Rekonstruksi Pasca Bencana)

**ZERRY RISKY YUARDHINO, ST.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19750314 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
 PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	75%
2.	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen
3.	Terlaksananya pelatihan pengkajian kebutuhan pascabencana	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan	75 orang
4.	Tersusunnya perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana	Jumlah dokumen kebijakan teknis penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana	12 dokumen
5.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekonstruksi pasca bencana	12 Kali
6.	Tersusunnya analisis rencana partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat	Jumlah dokumen analisis rencana partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat	12 dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000,-
Jumlah	Rp. 150.000.000,-

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,



**Dra. SRI MARIYANI, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19661221 198903 2 010

PENATA PENANGGULANGAN  
BENCANA MUDA  
(sebagai Sub-koordinator Sub-substansi  
Rekonstruksi Pasca Bencana)



**ZERRY RISKY YUARDHINO, ST.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19750314 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAT HARTAWAN, SE, MPSc, M.Eng.

Jabatan : Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RETNO INDRIYAH, S.E

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

**RETNO INDRIYAH, S.E**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009

PERENCANA AHLI MUDA

**RAHMAT HARTAWAN, SE, MPSc, M.Eng.**  
Pembina  
NIP. 19750426 200501 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
SEKRETARIAT  
PERENCANA AHLI MUDA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 (enam) Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 (empat) Laporan
4.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 (dua) Laporan
5.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 (tujuh) Unit
6.	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 (dua belas) Dokumen
7.	Terlaksananya penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Sektor	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Sektor	1 (satu) Dokumen
8.	Terlaksananya penyusunan Rencana Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan	Jumlah dokumen Rencana Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan	4 (empat) Dokumen
9.	Terlaksananya penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	12 (dua belas) dokumen
10.	Tersedianya Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	Jumlah dokumen hasil pengolahan Data dan Informasi Evaluasi Rencana pembangunan Tahunan	12 (dua belas) Dokumen

11.	Terlaksananya penyusunan Telaahan Lingkup Sektoral / Regional dalam Berbagai Forum Musyawarah, Rapat Koordinasi, dan Forum Konsultasi Publik Lainnya dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Telaahan Lingkup Sektoral / Regional dalam Berbagai Forum Musyawarah, Rapat Koordinasi, dan Forum Konsultasi Publik Lainnya dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan	2 (dua) Dokumen
12.	Terlaksananya penyusunan Rencana Pembangunan Sektoral	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Sektoral	1 (satu) Dokumen
13.	Terlaksananya penyusunan Kebijakan / Program Strategis Sektoral	Jumlah dokumen Kebijakan / Program Strategis Sektoral	1 (satu) Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 213.360.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 48.200.000,-
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 91.920.000,-
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 217.210.000,-
5. Pengendalian Operasi dan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 285.290.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 855.980.000,-</b>

Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

**RETNO INDRIYAH, S.E**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19730814 199803 2 009

PERENCANA AHLI MUDA

**RAHMAT HARTAWAN, SE, MPSc, M.Eng.**  
 Pembina  
 NIP. 19750426 200501 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. ERTJE SOAMOLE  
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Sekretariat Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang  
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RETNO INDRIYAH, S.E  
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang  
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

**RETNO INDRIYAH, S.E**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009

ANALIS KEUANGAN  
PUSAT DAN DAERAH MUDA,  
(Sebagai Sub-koordinator Sub-  
substansi Keuangan),

**Dra. ERTJE SOAMOLE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19651123 199703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG  
 SEKRETARIAT  
 ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya administrasi keuangan yang tepat waktu	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%
2.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 (dua puluh dua) Orang
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 ( satu ) Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.375.328.202,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 38.970.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 4.414.298.202,-</b>

Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

ANALIS KEUANGAN  
 PUSAT DAN DAERAH MUDA,  
 (Sebagai Sub-koordinator Sub-  
 substansi Keuangan),

**RETNO INDRIYAH, S.E**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19730814 199803 2 009

**Dra. ERTJE SOAMOLE**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19651123 199703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRISNO AJI, SE

Jabatan : Kepala Sub-bagian Umum Sekretariat Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RETNO INDRIYAH, S.E

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

**RETNO INDRIYAH, S.E**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009

KEPALA SUBBAGIAN UMUM,

**TRISNO AJI, SE.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650103 198703 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
SEKRETARIAT  
SUB-BAGIAN UMUM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitasi layanan kepegawaian	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%
2.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket
3.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Paket
4.	Terlaksananya penyediaan kebutuhan kantor	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%
5.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 (dua) Paket
6.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 (tiga) Paket
7.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 (tiga) Paket
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 (dua) dokumen
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 (dua belas) dokumen
10.	Terlaksananya penyediaan Peralatan dan mesin lainnya	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100%
11.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 (satu) Unit
12.	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 (dua) Unit
13.	Terlaksananya administrasi perkantoran	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%
14.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 (dua belas) laporan

15.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 (dua belas) laporan
16.	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%
17.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 (dua puluh lima) Unit
18.	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 (dua puluh) Unit
19.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 (seratus enam) unit
20.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 (satu) Unit

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 45.000.000,-
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 140.000.000,-
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 10.000.000,-
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 78.721.000,-
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 265.379.900,-
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6.000.000,-
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 154.898.000,-
8. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 212.608.000,-
9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 400.000.000,-
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 150.000.000,-
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 274.524.480,-

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 354.161.400,-
13. Pemeliharaan Mebel	Rp. 17.980.000,-
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 75.912.115,-
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 50.000.000,-
	<b>Rp. 2.235.184.895,-</b>

Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,



**RETNO INDRIYAH, S.E**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009

KEPALA SUBBAGIAN UMUM,



**TRISNO AJI, SE.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650103 198703 1 016



PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI PRIHANDOKO, S.HUT  
Jabatan : Analis Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUNG SRIYURIANTO, SE.  
Jabatan : Analis Kebencanaan Muda Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang (sebagai Sub-  
koordinator Sub-substansi Pencegahan Bencana)

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN KESIAPSIAGAAN,

Drs. HERU PRIJANTONO, MM.  
Pembina  
NIP. 19650301 199412 1 002

ANALIS MITIGASI BENCANA,

DWI PRIHANDOKO, S.HUT  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 196803232001121 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
ANALIS BENCANA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya analisis terhadap bencana yang terjadi di Kota Malang	Jumlah dokumen hasil analisis bencana di Kota Malang	6 dokumen
2	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan acara Pelatihan SAR di Kota Malang	Jumlah bahan untuk pelaksanaan acara Pelatihan SAR di Kota Malang	1 berkas
3	Terlaksananya acara Pelatihan SAR di Kota Malang	Jumlah laporan pelaksanaan acara Pelatihan SAR di Kota Malang	1 laporan
4	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan acara Pelatihan KATANA	Jumlah bahan untuk pelaksanaan acara Pelatihan KATANA	1 berkas
5	Terlaksananya acara Pelatihan KATANA	Jumlah laporan pelaksanaan acara Pelatihan KATANA	1 laporan
6	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan acara Pelatihan Manajemen Keposkoan	Jumlah bahan untuk pelaksanaan acara Pelatihan Manajemen Keposkoan	1 berkas
7	Terlaksananya acara Pelatihan Manajemen Keposkoan	Jumlah laporan pelaksanaan acara Pelatihan Manajemen Keposkoan	1 laporan
8	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan acara Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	Jumlah bahan untuk pelaksanaan acara Pelatihan Manajemen Keposkoan	1 berkas
9	Terlaksananya acara Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan acara Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	1 laporan
10	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan Pengadaan Peralatan Posko Kecamatan Tangguh	Jumlah bahan untuk pelaksanaan Pengadaan Peralatan Posko Kecamatan Tangguh	6 berkas
11	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Posko Kecamatan Tangguh	Jumlah laporan pelaksanaan Peralatan Posko Kecamatan Tangguh	6 laporan

Malang, Januari 2023

**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN KESIAPSIAGAAN,**

**ANALIS BENCANA,**

**Drs. HERU PRIJANTONO, MM.**  
Pembina  
NIP. 19650301 199412 1 002

**DWI PRIHANDOKO, S.HUT**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 196803232001121 003



## PEMERINTAH KOTA MALANG

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

---

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CORNELLIA SELVYANA AYOE, SE, MM.

Jabatan : Analis Mitigasi Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUNG SRIYURIANTO, SE.

Jabatan : Analis Kebencanaan Muda Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN  
KESIAPSIAGAAN,

Drs. HERU PRIJANTONO, MM.

Pembina

NIP. 19650301 199412 1 002

ANALIS MITIGASI BENCANA,

CORNELLIA SELVYANA AYOE, SE, MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19820716 200903 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
 ANALIS MITIGASI BENCANA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya analisis mitigasi bencana di Kota Malang	Jumlah dokumen hasil analisis mitigasi bencana di Kota Malang	7 dokumen
2	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan acara Pelatihan Pencegahan Bencana	Jumlah bahan untuk pelaksanaan acara Pelatihan Pencegahan Bencana	4 berkas
3	Terlaksananya acara Pelatihan Pencegahan Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan acara Pelatihan Pencegahan Bencana	4 laporan
4	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan acara Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	Jumlah bahan untuk pelaksanaan acara Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	1 berkas
5	Terlaksananya acara Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan acara Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	1 laporan
6	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan acara Sosialisasi dan Simulasi SPAB	Jumlah bahan untuk pelaksanaan acara Sosialisasi dan Simulasi SPAB	3 berkas
7	Terlaksananya acara Sosialisasi dan Simulasi SPAB	Jumlah laporan pelaksanaan acara Sosialisasi dan Simulasi SPAB	3 laporan
8	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan Pengadaan yang diserahkan kepada Masyarakat	Jumlah bahan untuk pelaksanaan Pengadaan yang diserahkan kepada Masyarakat	6 berkas
9	Terlaksananya acara Pengadaan yang diserahkan kepada Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan yang diserahkan kepada Masyarakat	6 laporan
10	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Pendukung Pencarian	Jumlah bahan untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Pendukung Pencarian	1 berkas
11	Terlaksananya acara Pengadaan Alat Pendukung Pencarian	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Alat Pendukung Pencarian	1 laporan
12	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan Pengadaan Rambu Peringatan Rawan Bencana	Jumlah bahan untuk pelaksanaan Pengadaan Rambu Peringatan Rawan Bencana	1 berkas
13	Terlaksananya acara Pengadaan Rambu Peringatan Rawan Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Rambu Peringatan Rawan Bencana	1 laporan
14	Tersedianya bahan untuk pelaksanaan Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi	Jumlah bahan untuk pelaksanaan Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi	1 berkas

15	Terlaksananya acara Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi	Jumlah laporan pelaksanaan Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi	1 laporan
----	---	--	-----------

Malang, Januari 2023

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN  
KESIAPSIAGAAN,



Drs. HERU PRIJANTONO, MM.

Pembina

NIP. 19650301 199412 1 002

ANALIS MITIGASI BENCANA,



CORNELLIA SELVYANA AYOE, SE, MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19820716 200903 2 005



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET DARMADI, SE  
Jabatan : Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam Seksi Tanggap Darurat Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dra. KHABIBAH, M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

**Dra. KHABIBAH, MM**  
Pembina  
NIP. 19670817 199903 2 004

PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA  
ALAM SEKSI TANGGAP DARURAT

**SLAMET DARMADI, SE.**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19680323 200112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM SEKSI TANGGAP DARURAT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya hasil telaah terhadap bencana alam	Jumlah hasil telaah bencana alam	100 telaah
2	Terlaksananya Operasional Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	250 orang
3	Terlaksananya Gelar peralatan Search and Rescue (SAR)	Jumlah pelaksanaan gelar peralatan Search and Rescue (SAR)	4 kali
4	Terlaksananya operasional Pos Komando Tim Reaksi Cepat BPBD	Persentase kehadiran anggota Tim Reaksi Cepat BPBD di Pos Komando	100%
5	Terwujudnya Tim Reaksi Cepat BPBD yang disiplin dan Responsif	Persentase kehadiran anggota Tim Reaksi Cepat BPBD dilokasi bencana	100%

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
KEDARURATAN DAN LOGISTIK,



**Dra. KHABIBAH, MM**  
Pembina  
NIP. 19670817 199903 2 0040

PENELAAH BAHAN KAJIAN  
BENCANA ALAM SEKSI  
TANGGAP DARURAT



**SLAMET DARMADI, SE.**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19680323 200112 1 003



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SABARIYANTI, S.H

Jabatan : Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam Seksi Logistik  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dra. KHABIBAH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik BPBD Kota Malang  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

**Dra. KHABIBAH, MM**

Pembina

NIP. 19670817 199903 2 004

PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA  
ALAM SEKSI LOGISTIK

**SABARIYANTI, S.H**

Penata Muda Tk. I

NIP. 19720412 200801 2 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM SEKSI LOGISTIK**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan Logistik untuk masyarakat Korban bencana	Jumlah bahan Logistik Untuk Penanggulangan Bencana yang disediakan	- (200 Paket) Sembako - (120 Unit ) Terpal
2.	Tersedianya Bahan Baku Bangunan untuk darurat bencana	Jumlah Bahan Baku Bangunan untuk darurat bencana yang disediakan	- (201 Batang ) Bambu - (200m <sup>2</sup> ) Bambu Anyam - (125 Batang) Reng Galvalum - (201 Lembar) Seng Gelombang
3.	Terwujudnya Pengelolaan Gudang Logistik yang Efektif dan Efisien	Jumlah Laporan Pengelolaan Gudang Logistik	- 12 Laporan

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
KEDARURATAN DAN LOGISTIK,



**Dra. KHABIBAH, MM**

Pembina

NIP. 19670817 199903 2 0040

PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA  
ALAM SEKSI LOGISTIK



**SABARIYANTI, S.H**

Penata Muda Tk. I

NIP. 19720412 200801 2 019



## PEMERINTAH KOTA MALANG

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALIF FURAHMAN HAKIM, ST.

Jabatan : Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dra. SRI MARIYANI, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

**Dra. SRI MARIYANI, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19661221 198903 2 010

PENELAAH BAHAN KAJIAN  
BENCANA ALAM,

**ALIF FURAHMAN HAKIM, ST.**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19800124 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Jumlah bahan untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	1 eksemplar
2.	Terlaksananya rapat untuk penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Jumlah rapat untuk penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	10 Kali
3.	Tersediannya bahan untuk pelaksanaan Pelatihan Jitupasna	Jumlah bahan untuk pelaksanaan Pelatihan Jitupasna	1 Paket
	Tersediannya bahan untuk penyusunan dokumentasi Jitupasna	Jumlah bahan untuk penyusunan dokumentasi Jitupasna	1 Paket
4.	Terlaksananya rapat untuk penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Bencana	Jumlah rapat untuk Rancangan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Bencana	6 Kali
5.	Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada pasca bencana	Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana	12 eksemplar
6.	Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana pada pasca bencana	Jumlah data hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana	12 eksemplar
7.	Tersedianya bahan untuk analisis rencana partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat	Jumlah bahan untuk analisis rencana partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat	12 eksemplar

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,



**Dra. SRI MARIYANI, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19661221 198903 2 010

PENELAAH BAHAN KAJIAN  
BENCANA ALAM,



**ALIF FURAHMAN HAKIM, ST.**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19800124 201101 1 001





PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUTUK PRISWATI, S.M.

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RETNO INDRIYAH, S.E

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

**RETNO INDRIYAH, S.E**

Penata Tingkat I

NIP. 19730814 199803 2 009

BENDAHARA PENGELUARAN,

**TUTUK PRISWATI, S.M.**

Penata Muda

NIP. 19810820 200901 2 001

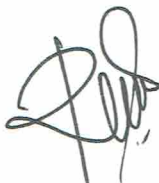
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
SEKRETARIAT  
BENDAHARA PENGELUARAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1. Jumlah laporan pembukuan uang/surat berharga	12 laporan
		2. Jumlah dokumen pengajuan dan pembayaran berdasarkan perintah PPK-SKPD	450 dokumen
		3. Jumlah dokumen pelaksanaan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara	400 dokumen
		4. Jumlah dokumen pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke kas Negara	400 dokumen
		5. Jumlah dokumen pertanggungjawaban pengelolaan Uang Persediaan dan Ganti Uang	10 dokumen
		6. Jumlah laporan realisasi penyerapan anggaran	12 laporan
2	Terlaksananya administrasi gaji dan tambahan penghasilan pegawai	Jumlah dokumen daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai	28 dokumen
3	Tersedianya bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1. Jumlah bahan laporan Neraca	1 berkas
		2. Jumlah bahan Laporan LRA	1 berkas
		3. Jumlah bahan laporan CALK	1 berkas

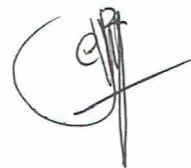
Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

BENDAHARA PENGELUARAN,



**RETNO INDRIYAH, S.E**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009



**TUTUK PRISWATI, S.M.**  
Penata Muda  
NIP. 19810820 200901 2 001



PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAUFIQUR RAKHMAN, A.Md

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RETNO INDRIYAH, S.E

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

**RETNO INDRIYAH, S.E**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009

PENGADMINISTRASI KEUANGAN,

**TAUFIQUR RAKHMAN, A.Md**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19850101 201001 1 031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
SEKRETARIAT  
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1. Jumlah arsip dan dokumentasi di bidang keuangan	400 berkas
		2. Jumlah konversi surat setoran pajak ke bank persepsi	300 surat
		3. Jumlah pembuatan bukti surat setoran pajak	300 surat
		4. Jumlah pengendalian administrasi data surat setoran pajak	300 surat
		5. Jumlah pengendalian administrasi data SPP, SPM, dan SP2D	400 berkas
2	Tersedianya bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Bahan Laporan Keuangan	1 berkas

Malang, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,

PENGADMINISTRASI KEUANGAN,



**RETNO INDRIYAH, S.E**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009



**TAUFIQUR RAKHMAN, A.Md**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19850101 201001 1 031



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDIYANTO

Jabatan : Pengadministrasi Umum Sekretariat Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TRISNO AJI, SE.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA SUBBAGIAN UMUM,

**TRISNO AJI, SE.**

Penata Tingkat I

NIP. 19650103 198703 1 016

PENGADMINISTRASI UMUM,

**RUDIYANTO**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19721118 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 SEKRETARIAT  
 SUB BAGIAN UMUM  
 PENGADMINISTRASI UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik	Jumlah kuitansi / bukti pembayaran telepon, air dan listrik	12 (dua belas) kuitansi / bukti
2.	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Udangan	Jumlah eksemplar media massa cetak	365 (tiga ratus enam puluh lima) Eksemplar
3.	Tersedianya dokumen SPPD untuk koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain	Jumlah berkas surat tugas dan SPPD	20 (dua puluh) berkas
4.	Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar	1. Jumlah register surat masuk	1.200 (seribu dua ratus) surat
		2. Jumlah register surat keluar	1.200 (seribu dua ratus) surat
5.	Terlaksananya monitoring kebersihan dan keamanan kantor	1. Jumlah laporan pelaksanaan tugas oleh petugas kebersihan	12 (dua belas) kali
		2. Jumlah laporan pelaksanaan tugas oleh petugas keamanan	12 (dua belas) kali
6.	Terlaksananya penerimaan tamu dinas	Jumlah kunjungan tamu dinas	12 (dua belas) kali

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA SUBBAGIAN UMUM,

**TRISNO AJI, SE.**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19650103 198703 1 016

PENGADMINISTRASI UMUM,

**RUDIYANTO**  
 Penata Muda Tingkat I  
 NIP. 19721118 199303 1 005



PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Telp. ( 0341 ) 3021657 Fax. (0341) 3021658 Malang  
email: [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id) website: <http://bpbd.malangkota.go.id> , Kode Pos: 65139

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARTI NUROCHMAH

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian Sekretariat Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TRISNO AJI, SE.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Malang

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA SUBBAGIAN UMUM,

**TRISNO AJI, SE.**

Penata Tingkat I

NIP. 19650103 198703 1 016

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN,

**ARTI NUROCHMAH**

Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19681012 201407 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 SEKRETARIAT  
 SUB BAGIAN UMUM  
 PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah surat usulan kenaikan gaji berkala	10 (sepuluh) surat
		Jumlah dokumen usulan kenaikan pangkat	6 (enam) dokumen
		Jumlah dokumen usulan penghargaan	1 (satu) dokumen
		Jumlah laporan rekapitulasi presensi bulanan aparatur	12 (dua belas) laporan
		Jumlah dokumen pengajuan pensiun	4 (empat) dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan rapat dinas	10 (sepuluh) laporan
		Jumlah dokumen kepegawaian lainnya	12 (dua belas) dokumen
2.	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	60 (Enam Puluh) Stel
3.	Terlaksananya acara Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah laporan pelaksanaan acara Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2 (dua) Laporan

Malang, 02 Januari 2023

KEPALA SUBBAGIAN UMUM,

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN,

**TRISNO AJI, SE.**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19650103 198703 1 016

**ARTI NUROCHMAH**  
 Pengatur Muda Tingkat I  
 NIP. 19681012 201407 2 001



